Judul : Belum serahkan LHKPN, DPR sulit diteladani
Tanggal : Jumat, 11 Maret 2016
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 6

KONTRADIKSI

Belum Serahkan LHKPN, DPR Sulit Diteladani

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa masih ada 203 anggota DPR RI yang belum mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari 560 anggota DPR yang ada.Yang mengejutkannya, ternyata Ketua DPR RI yang belum lama dilantik Ade Komarudin juga mengaku belum mengisi LHKPN.

Atas tindakan itu, Koordinator Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih, Arief Rachman, mengatakan bahwa keteladanan kini sulit ditemukan khususnya di kalangan anggota DPR RI.

"Hingga Februari 2016, atau lebih setahun dilantiknya anggota DPR RI, masih terdapat anggota DPR RI yang belum melaporkan kekayaan. Ini bukti tak ada keteladanan dari DPR," ucap Arief, kemarin (10/3).

Ini menunjukkan bahwa banyak anggota DPR RI yang baru menjabat sejak 2014 lalu hingga saat ini belum melaporkan harta kekayaan ke KPK. Adapun, Nama-nama tersebut dapat diakses di data LHKPN KPK secara terbuka.

"Untuk itu, Koalisi Masyarakat Untuk Parlemen Bersih akan mendatangi MKD. Sungguh miris melihat kondisi parlemen saat ini. Karena etika dewan telah tercemarkan atas tindakan tak menyerahkan LHKPN itu," tegasnya.

Sementara itu, Ade Komarudin mengakui bahwa dirinya belum menyerahkan LHKPN.

"Saya juga belum. Dan mungkin pada saat reses. Ini hanya soal waktu," kata Ade, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (10/3).

Senada, kolega Ade Komarudin di Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, juga mengakui belum memperbarui LHKPN-nya. "Saya sudah pernah menyerahkan lengkap tahun 2010, dan memang belum saya perbaharui," ujar Bambang, yang juga Wakil Bendahara Umum Partai Golkar.

Bambang menuturkan akan segera memperbaharui laporan harta kekayaannya. Menurut dia, KPK juga sebelumnya telah mengimbau anggota DPR segera memperbarui laporan harta kekayaannya setiap awal dan akhir masa jabatan. "Terima kasih sudah mengingatkan," tuturnya. **(dil)**